

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN BANK SAMPAH
INDUK (BSI) KUMALA DI KELURAHAN SUNGAI BAMBU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA**

¹Deni Nurdin, ²Sisman Prasetyo, ³Angella Rosha Pangestu

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹deni.nurdin.2014@gmail.com ²sisman.prasetyo@uta45jakarta.ac.id,

³angella.rossha@uta45jakarta.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 02-10-2025

Direvisi: 17-11-2025

Diterima: 01-12-2025

Abstract

This research is designed to explore the Policy Implementation concerning the Utilization of BSI Kumala in Sungai Bambu Village, Tanjung Priok District, North Jakarta. This study applies a qualitative methodology with a descriptive approach, where data was collected through structured interviews, observation, and documentation. Furthermore, the data analysis technique included the stages of Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verification, while the validity of the findings was tested using source triangulation directly in the field. This study adopts the theoretical framework proposed by George C. Edward III (in Subarno, 2021), namely the theory of public policy implementation, to determine the implementation of the policy on the utilization of BSI Kumala in Sungai Bambu Village and to evaluate whether the regulation has been implemented effectively. The results of this research indicate that out of the three indicators applied, communication, disposition, and organizational structure have been functioning as intended, although they have not yet reached their maximum potential. Meanwhile, one other indicator, the number of available personnel, is not yet adequate, and there is a need for additional workforce from the BSI Kumala management in Sungai Bambu Village, Tanjung Priok District, North Jakarta.

Keywords: *Policy Implementation, Utilization of BSI Kumala*

Abstrak

Riset ini dirancang agar mendalami Implementasi Kebijakan mengenai Pemanfaatan BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut. Studi ini menerapkan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data yang dilaksanakan via wawancara terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Berikutnya, teknik analisis data meliputi tahapan Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), sementara validitas temuan diuji menggunakan triangulasi sumber langsung di lapangan. Kajian ini mengadopsi kerangka teoretis yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Subarno, 2021), yakni teori implementasi kebijakan publik untuk mengetahui implementasi kebijakan pemanfaatan BSI Kumala di Kelurahan Sungai Bambu serta mengevaluasi apakah regulasi tersebut telah terlaksana secara efektif atau sebaliknya, Hasil penelitian ini bahwa dari 3 (tiga) indikator yang diterapkan telah berfungsi sebagaimana mestinya, meskipun belum mencapai potensi maksimalnya, yakni komunikasi disposisi dan struktur organisasi, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya yakni jumlah personil yang tersedia belum memadai dan perlu adanya penambahan tenaga kerja dari pihak BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut.

PENDAHULUAN

Kondisi faktual penanganan sampah yang menjadi tanggung jawab Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) di tingkat kota administratif atau kabupaten di DKI Jakarta merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perkotaan, terutama terkait efisiensi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan sistem otonomi daerah, pengelolaan sampah di Jakarta dilakukan secara desentralisasi, di mana Suku Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kota/kabupaten administratif (seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dll.) bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan pengelolaan sampah di wilayahnya. Ini menciptakan perbedaan kinerja dan inovasi antar wilayah tergantung pada kepemimpinan, sumber daya, dan keterlibatan masyarakat setempat. Meskipun terdapat regulasi dan target pengurangan sampah (misalnya Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah), banyak Suku Dinas menghadapi keterbatasan armada angkut, petugas kebersihan, dan tempat penampungan sementara (TPS). Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pengangkutan dan penumpukan sampah di beberapa titik. Sudin LH juga mendorong kolaborasi melalui program seperti Bank Sampah, TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan kampanye Jakarta Sadar Sampah. Namun, tingkat partisipasi masyarakat sangat bervariasi dan masih rendah di beberapa wilayah, terutama dalam pemilahan sampah dari sumber. Beberapa Suku Dinas telah mulai menggunakan aplikasi seperti E-Sampah, CMS Kebersihan, atau dashboard kinerja untuk memantau armada dan laporan dari masyarakat. Namun, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas wilayah administratif.

Pengelolaan sampah di Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, masih terlihat sangat minim, disebabkan tingkat kepedulian komunitas yang masih rendah dan menjadi kendala utama di wilayah itu. Efektivitas pemanfaatan Bank Sampah hingga kini belum mencapai level tertinggi, sehingga kesehatan lingkungan belum sepenuhnya terwujud, di mana lembaga ini memiliki kapasitas layanan pengelolaan sampah plastik terbatas pada angka 65%. Persoalan selanjutnya adalah kecenderungan warga untuk tidak melakukan pemilahan antara limbah organik dan anorganik, yang berakibat pada proses penanganan sampah menjadi lebih kompleks serta kurang efisien. Selain itu, ketersediaan area yang minim untuk TPA di lingkungan Kelurahan Sungai Bambu menjadi hambatan utama terkait lokasi penampungan limbah. Oleh karena itu, isu sampah

agaknya tetap menjadi salah satu persoalan krusial di Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terbukti dengan banyaknya warga yang membuang limbah di aliran sungai, lahan kosong, ataupun area di bawah jembatan tol.

Manajemen sampah di Kelurahan Sungai Bambu belum terkelola secara efektif. Situasi ini disebabkan oleh minimnya partisipasi warga dalam mendayagunakan limbah yang memiliki nilai ekonomis atau dapat didaur ulang. Keberadaan BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut diharapkan membawa dampak positif bagi komunitas terkait penanganan limbah di lingkungan sekitar. Keberhasilan proses komunal dalam pemanfaatan Bank Sampah ini bergantung pada beberapa elemen penentu, antara lain: tipe limbah yang ditangani (baik domestik maupun industrial), aspek geografis seperti kondisi area sekitar lokasi kegiatan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia yang mencakup keahlian serta partisipasi aktif penduduk, alokasi dana operasional (berbentuk finansial, aset, maupun layanan), hingga orientasi pemanfaatan produk akhir apakah untuk tujuan komersial atau konsumsi pribadi seperti pemakaian kompos untuk pertanian.

Aktivitas manajemen sampah yang diinisiasi oleh BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut telah berlangsung sejak 2016 dengan ragam program yang dijalankan. Program itu meliputi pengumpulan limbah dari kediaman warga, yang dilanjutkan dengan proses pemilahan berdasarkan kategori materialnya. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan limbah, tetapi juga aktif menyelenggarakan edukasi kepada publik guna menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. BSI Kumala dinahkodai oleh Bapak Budi Hermawan, SST, serta didirikan atas inisiatif KMM yang kerap dikenal dengan Kreatifitas Masyarakat Mandiri. Organisasi ini mempunyai total delapan personil. Sebanyak enam orang staf menerima upah dari internal Bank Sampah, sementara dua orang lainnya, yang menjabat sebagai ketua serta wakil, memperoleh honorarium dari pemerintah. Jam operasional BSI Kumala berlangsung dari pukul 06.00 hingga dengan 17.00.

BSI Kumala didukung oleh armada transportasi untuk pengangkutan limbah yang beroperasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan total empat unit kendaraan angkut, limbah yang terkumpul kemudian akan dipilah berdasarkan kategorinya. Material plastik yang telah terpisah selanjutnya diolah menjadi produk kerajinan tangan agar dijual. Prinsip kerja BSI Kumala serupa dengan konsep Bank Sampah secara umum, di mana anggota masyarakat berperan sebagai nasabah. Warga yang berpartisipasi menjadi bagian dari keanggotaan institusi ini. BSI Kumala bertugas menjemput sampah langsung dari kediaman warga. Upaya peningkatan kesadaran komunitas setempat untuk terlibat dalam pengumpulan limbah ini ditempuh melalui program sosialisasi yang

menyasar seluruh penduduk. Dari uraian latar belakang, bisa ditarik simpulan bahwasanya mengenai penanganan sampah plastik di Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara belum memadai. Di samping itu, teridentifikasi pula adanya pelayanan otoritas yang belum maksimal dalam manajemen limbah, keterbatasan diseminasi informasi, tingkat kepedulian publik yang masih rendah, serta penyusutan area TPA akibat meningkatnya densitas populasi yang berdampak negatif pada kesehatan lingkungan. Kehadiran BSI Kumala diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta meminimalisir praktik pembakaran dan penimbunan sampah.

METODE PENELITIAN

Kajian riset ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sugiyono (2019: 9) menjelaskan bahwasanya metodologi riset kualitatif didasarkan pada paradigma filsafat postpositivisme, yang memandang fenomena sosial sebagai sebuah kesatuan yang utuh, rumit, dinamis, sarat makna, serta memiliki hubungan antargejala yang bersifat timbal balik (resiprokal). Pendekatan kualitatif ini relevan untuk mengkaji objek dalam konteks naturalnya, yaitu kondisi yang berjalan secara alami tanpa adanya manipulasi dari peneliti, di mana keberadaan peneliti pun tidak memengaruhi dinamika objek. Hal ini karena esensi dari riset kualitatif ialah observasi dalam latar alamiah (*natural setting*). Dalam metodologi kualitatif, sang periset berperan sebagai instrumen primer. Dengan demikian, seorang periset dituntut agar mempunyai landasan teoretis dan pemahaman yang komprehensif, serta diekspetasikan bisa bersikap teliti, tanggap, dan interaktif dengan lingkungan risetnya demi memperoleh data dan wawasan yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sungai Bambu merupakan bagian dari wilayah Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mempunyai kepadatan populasi tinggi dan mencakup area permukiman kumuh. Lokasi pembuangan sampah (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA) di area ini utamanya berada di area bawah jalan Tol Wiyoto Wiyono, khususnya di sepanjang Jalan Sungai Bambu Raya. Sejumlah titik di bawah jalan tol tersebut difungsikan sebagai lokasi penampungan limbah. Di dalam kawasan permukiman padat itu, komunitasnya pun masih memiliki kebiasaan membuang limbah domestik secara langsung ke aliran sungai atau lahan yang tidak terpakai. Penyebab utama dari perilaku ini adalah minimnya kesadaran serta pemahaman yang tidak memadai terkait metode

pengelolaan sampah yang semestinya. Praktik yang tidak baik ini mengakibatkan kondisi lingkungan di sekitar Kelurahan Sungai Bambu. Sungai atau kali yang sering menyebabkan banjir di daerah Sungai Bambu adalah Kali Angke. Selain Kali Angke, ada juga beberapa sungai lain yang bisa menjadi penyebab banjir di daerah tersebut, seperti Kali Ciledug dan Kali Sunter, sering terjadi banjir bila hujan deras.

Kondisi itu menjadi pendorong bagi aparat pemerintah lokal bersama para mahasiswa untuk secara intensif melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai cara memelihara lingkungan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan dan Pemanfaatan BSI Kumala melalui program Bank Sampah. Berikut adalah analisis Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BSI Kumala melalui program Bank Sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut, yang mengacu pada kerangka teori Edwards III (dalam Agustino, 2020). Guna mencapai implementasi kebijakan yang ideal, para pelaksana kebijakan perlu memahami secara komprehensif tugas mereka. Di samping itu, kelompok sasaran dari kebijakan tersebut juga harus menerima informasi yang jelas mengenai tujuan dan targetnya. Oleh karena itu, diseminasi informasi atau sosialisasi menjadi elemen krusial untuk mendukung keberhasilan dari Implementasi Kebijakan dengan indikator sebagai berikut

1. Komunikasi

Efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin antara para pelaksana kebijakan dengan kelompok yang menjadi target (target group). Interaksi komunikatif ini menjadi penentu tercapainya sasaran dari Implementasi Kebijakan. Melalui penyampaian yang tepat, tujuan dan sasaran kebijakan dapat diselaraskan guna mencegah terjadinya distorsi informasi (Neneng Siti Maryam, 2023). Dalam konteks Implementasi Kebijakan, komunikasi merujuk pada proses di mana para eksekutor kebijakan memahami secara pasti apa yang harus mereka kerjakan terhadap kebijakan itu, serta aspek-aspek seperti transmisi, kejernihan pesan, dan konsistensi informasi wajib disampaikan secara lugas kepada para implementor agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Menurut dari beberapa hasil wawancara dengan informan, maka peneliti secara keseluruhan menarik kesimpulan tentang komunikasi pada pelaksanaan program BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Ditinjau dari aspek transmisi, penyampaian informasi dijalankan oleh aparat kelurahan beserta para motivator Bank Sampah, dikarenakan peran BSI Kumala lebih berfokus pada penyediaan fasilitas

untuk pengelolaan sampah. Pihak BSI Kumala sendiri telah mendelegasikan otoritas kepada setiap kelurahan untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi warganya. Lebih lanjut, terdapat tujuh motivator yang bertugas di setiap kelurahan, sementara pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup hanya bersifat sebagai pengawas atau pengendali.

2. Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya memegang peranan yang tidak kalah krusial dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BSI Kumala di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut. Sekalipun ketentuan dan aturan telah disampaikan dengan sangat jelas, konsisten, dan akurat, apabila para pelaksana yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bekerja secara efektif, maka Implementasi Kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumber daya di sini merujuk pada segala elemen yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong keberhasilan Implementasi Kebijakan. Ketersediaan sumber daya merupakan faktor fundamental bagi keberhasilan suatu kebijakan. Jika sebuah kebijakan telah dikomunikasikan secara jernih dan ajek, namun para implementor menghadapi kendala kekurangan sumber daya untuk menjalankannya, maka kebijakan itu tidak akan berlangsung secara efisien (Subarsono, 2021). Maka dari itu, pemenuhan sumber daya menjadi sebuah keharusan apabila tujuan sebuah kebijakan publik hendak dicapai. Sumber daya ini mencakup tenaga manusia, alokasi finansial atau anggaran, serta ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana (Agustino, 2022). Sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Edward III menegaskan bahwa, “kemungkinan sumber daya terpenting dalam menerapkan kebijakan adalah staf”. Edward III juga menambahkan bahwa tanpa memandang sejernih dan seakurat apa pun penyampaian perintah pelaksanaan, dan tidak peduli transmisi informasinya berjalan akurat, apabila personel yang bertugas tidak dibekali sumber daya yang cukup untuk bekerja secara efisien, maka implementasi tidak akan efektif.

Merujuk pada temuan penelitian penulis, jumlah staf di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut tercatat sebanyak 12 individu, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Data Pegawai Bank Sampah Induk Kumala di Kelurahan Sungai Bambu

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Ketua BSI Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1

2.	Wakil Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1
3.	Sekretaris Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1
4.	Bendahara Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1
5.	Teller Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1
6.	Humas Kumala Kelurahan Sungai Bambu	1
7.	Koordinator Produksi Daur Ulang Sampah An-Organik	1
8.	Koordinator Produksi Daur Ulang Sampah Organik	1
9.	Pemilah & Penimbang	3
	Jumlah	12

(Sumber: Data dari Sekretariat BSI Kumala 2025)

Tenaga kerja yang terlibat mencakup ketersediaan petugas/pegawai dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu serta personel dari yayasan mitra yang mendukung proses Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Bank Sampah. Setiap individu bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pihak BSI Kumala sebagai pelaksana kebijakan di Kelurahan Sungai Bambu didukung oleh pihak yayasan dalam hal suportivitas melalui pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga menciptakan sinergi yang saling melengkapi. Tentu saja, baik personel BSI Kumala maupun Yayasan Kumala mempunyai kapabilitas dan wawasan yang dibutuhkan untuk mendampingi masyarakat dalam mengelola sampah secara aman dan efisien. Melalui Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BSI Kumala ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat mengenai urgensi menjaga kebersihan lingkungan, khususnya terkait persoalan sampah yang semestinya dapat didaur ulang untuk mencegah akumulasi yang berpotensi menjadi sumber penyakit.

Berdasarkan analisis temuan tanya jawab pekerja, periset menyimpulkan secara keseluruhan bahwa ketersediaan sumber daya di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut belum terkelola secara optimal. Dari aspek tenaga manusia, kapabilitasnya belum mumpuni, yang tercermin dari jumlah staf yang tidak sebanding dengan keahlian atau kompetensi yang diperlukan. Akan tetapi meskipun jumlah pegawai/staff masih sangat kurang BSI Kumala pernah mendapatkan prestasi penghargaan yaitu :

1. Bank Sampah Unit Terbaik Tahun 2019 (Piagam penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta)
2. Bank Sampah Induk Terbaik Peringkat Satu Tingkat Nasional (Piagam KLHK R)

Gambar 1 : Prestasi Penghargaan BSI Kumala



Penghargaan BSI Terbaik K-1 Tingkat Nasional
Tahun 2024 dari KLHK RI



Penghargaan BSU Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta

Mengacu pada data dialog tanya jawab (wawancara) dan pengamatan atau observasi lapangan, bisa ditarik kesimpulan bahwa sumber daya peralatan yang ada di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut juga belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan sejumlah alat produksi vital seperti mesin penghancur plastik, di samping itu mesin penggiling kaca dan mesin press kertas sebetulnya sangat menunjang kelancaran proses produksi. Sehingga sumber daya peralatan yang sangat membantu meningkatnya hasil produksi di BSI Kumala di Kelurahan Sungai Bambu.



Gambar2 : Contoh Beberapa Hasil Produksi Pemanfaatan BSI Kumala

Sumber : Sekretariat BSI Kumala 2025)

3. Disposisi

Menurut Edwards III (dalam Agustino 2022) Guna mencapai Implementasi Kebijakan yang diharapkan, disposisi atau sikap dari para pelaksana menjadi faktor penentu efektivitas; jika ingin berhasil, para eksekutor kebijakan tidak cukup hanya memahami tugasnya, tetapi juga wajib mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi pada penelitian ini merupakan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana (implementor) yaitu petugas bank sampah induk Kumala maupun penunjangnya. Sikap para pelaksana berkaitan dengan implementasi kebijakan pemanfaatan bank sampah induk Kumala di Kelurahan Sungai Bambu memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta fungsi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui dialog tanya jawab dengan sejumlah petugas yang ada, mengenai disposisi/sikap para implementor bisa diketahui bahwasanya kinerja mereka sudah menunjukkan hasil yang memadai, seperti sosialisasi yang berjalan cukup bagus, yang terlihat dari pendekatan yang dilakukan oleh petugas dan motivator. Disposisi mampu dimaknai sebagai watak atau karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan/program. Beberapa karakter esensial yang dibutuhkan serta signifikan dalam diri pelaksana ialah integritas, sikap demokratis, serta komitmen yang kuat. Sikap integritas memberikan arahan kepada pelaksana untuk senantiasa berada pada jalur program yang telah digariskan. Integritas dan komitmen akan menjadikan pelaksana lebih bersemangat dan

berdedikasi dalam menjalankan setiap tahapan program, sementara pembawaan yang demokratis akan membangun citra positif bagi pelaksana dan kebijakan itu sendiri di hadapan anggota kelompok.

Maka sebab itu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kecenderungan para pelaksana kebijakan tergolong positif, di mana mereka kompeten untuk menjalankan mandat dan peranan utamanya, serta menunjukkan dedikasi dalam menunaikan tanggung jawabnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memberikan dampak yang berarti bagi implementasi kebijakan pemanfaatan bank sampah induk Kumala, Mengacu pada pandangan Edwards III (dalam Agustino 2022), ada dua faktor penentu yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik, yakni: Elemen pertama adalah mekanisme pelaksanaan kebijakan yang umumnya telah dirumuskan dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (SOP). Prosedur Operasional Standar (SOP) didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas rutin dan terencana yang memfasilitasi para pegawai dalam mengerjakan kegiatan harian mereka selaras dengan standar yang telah ditentukan. SOP berfungsi sebagai panduan bagi setiap pelaksana agar dalam implementasinya tidak menyimpang dari tujuan serta sasaran kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa: tingkat kejelasan standar operasional—yang mencakup mekanisme, sistem, dan prosedur implementasi, beserta pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di antara para aktor, serta harmonisasi hubungan antar-organisasi pelaksana—turut menjadi faktor determinan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari temuan dialog tanya jawab yang sudah tertera, dalam pelaksanaan pemanfaatan bank sampah induk Kumala ialah pemegang mandat primer untuk kegiatan pembinaan, kontrol, serta supervisi penyelenggaraan kebersihan lingkungan disekitarnya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bersama dengan Lembaga Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda). Otoritas yang diamanatkan kepada personil BSI Kumala untuk menjalankan fungsi pembinaan, kontrol, dan supervisi pada pengelolaan bank sampah.

Faktor struktur birokrasi memegang peranan krusial dalam suatu implementasi kebijakan. Dimensi birokrasi ini mencakup dua elemen utama: mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme penerapan kebijakan dirumuskan melalui Prosedur Operasional Standar (SOP) yang tertera dalam pedoman program/kebijakan. Secara definitif, SOP merupakan sebuah aktivitas bersifat rutin yang menuntut para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas

hariannya sesuai dengan tolok ukur yang telah digariskan. Terdapat dua karakteristik fundamental dari suatu birokrasi, antara lain:

1. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Transparansi Prosedur Operasional Standar—yang meliputi mekanisme, pembagian tugas pokok, sistem, prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab antar-pelaku—menjadi jaminan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kebijakan penanganan sampah memerlukan adanya inovasi atau metode kerja baru guna mengoptimalkan cara kerja yang sudah ada namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Implementasi kebijakan pemanfaatan sampah melalui program BSI Kumala, yang berada di bawah naungan Yayasan Kumala dan merupakan binaan DLH Kota Administrasi Jakarta Utara, memiliki SOP yang dijadikan sebagai rujukan bagi mekanisme, sistem, dan alokasi sumber daya.

Gambar3 . : Buku Petunjuk Pemilahan Sampah



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2025

Prosedur mekanis dalam implementasi kebijakan pengelolaan untuk pemanfaatan sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut dirincikan pada buku panduan pemilahan sampah yang diterbitkan oleh BSI Kumala. Di dalam buku panduan tersebut, tertuang mekanisme prosedur operasional Bank Sampah, yakni:

- 1) Langkah pertama adalah pembentukan tim pelaksana program yang terdiri atas pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris & bendahara, humas, tim produksi (mencakup pemilah, penimbang, pengemas), dan teller.

- 2) Tahap kedua adalah menetapkan kategori sampah yang dapat diterima berikut nilai harganya bagi nasabah, di mana penentuan harga di BSI Kumala bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan kurs dolar.
- 3) Poin ketiga, SOP untuk menjadi nasabah Bank Sampah mengharuskan setiap individu yang berminat menabung untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai nasabah individu dengan mengisi formulir yang berisi (No. KTP/SIM, Nama, No Telp, TTL, Alamat, Kategori nasabah individu) dan jika nasabah kolektif mengisi formulir dan MoU yang berisi (Nama kelompok, Alamat kelompok, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Jabatan dalam kelompok) dalam tahap ini nasabah akan menerima buku tabungan yang nantinya harus dibawah sebagai bukti catatan setiap kali menabung.
- 4) Keempat, setiap anggota yang menyetorkan sampah diwajibkan agar memastikan limbah tersebut dalam kondisi bersih atau sudah dipilah yang kemudian bisa langsung diserahkan untuk ditimbang di tempat BSI Kumala dalam tahap ini juga nasabah akan mengisi daftar hadir nasabah yang berisi (nama, tanda tangan).
- 5) Kelima, berlangsung proses penimbangan oleh staf produksi BSI Kumala, di mana pada fase ini berat sampah akan diukur dan harganya ditentukan, dengan catatan bahwa nilai setiap jenis sampah bervariasi.
- 6) Keenam adalah tahap pencatatan nominal rupiah ke dalam buku tabungan nasabah dan administrasi BSI Kumala; proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan mesin cetak passbook sementara pendataan internal memanfaatkan program komputer seperti Ms. Excel. Terkait sistem pembayaran, nasabah diberikan opsi untuk menerima dalam bentuk uang tunai atau mengalihkannya untuk pembayaran tagihan listrik rumah tangga. Mengingat BSI Kumala adalah Bank Sampah binaan Yayasan Kumala, akses pembayaran tagihan melalui tabungan sampah ini difasilitasi.
- 7) Ketujuh, penarikan saldo tabungan oleh nasabah memiliki ketentuan interval minimal tiga bulan sekali.
- 8) Kedelapan, setelah sampah terkumpul, terpilah, dan dikemas sesuai standar, maka limbah tersebut siap didistribusikan kepada pihak pengepul.

Prosedur bagi nasabah kolektif mempunyai perbedaan dengan nasabah perorangan, karena penyetoran sampah akan dijemput langsung oleh pihak BSI Kumala melalui layanan yang disebut Bangkeling (Bank Sampah Keliling). Layanan Bangkeling ini terbagi atas dua jenis:

gratis dan berbayar. Layanan berbayar diperuntukkan bagi nasabah individu, unit, dan korporasi. Sementara itu, layanan gratis dikhususkan bagi sekolah dan tempat ibadah, dengan syarat minimum total sampah yang diangkut mencapai 200 kg atau setara dengan kapasitas muatan satu motor Tossa. Untuk layanan berbayar, tidak ada batasan jumlah minimal sampah maupun jarak lokasi penjemputan. Sistem tarifnya ditentukan berdasarkan jenis armada yang digunakan serta jarak tempuh, di mana penetapan harga untuk jarak lokasi penjemputan mengacu pada standar harga yang mendekati tarif aplikasi ojek daring.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut telah selaras dengan mekanisme yang diterapkan, yang memungkinkan kebijakan itu dapat beroperasi dan terimplementasi secara efektif.

2. Fragmentasi

Fragmentasi didefinisikan sebagai penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan ke beberapa unit yang berbeda, sehingga memerlukan adanya koordinasi antar-unit tersebut. Lazimnya, semakin tinggi tingkat koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kebijakan, maka semakin kecil probabilitas keberhasilan program tersebut. Kondisi fragmentasi ini dapat mengakibatkan perspektif yang sempit pada banyak lembaga birokrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut, terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas pada setiap bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut adalah struktur implementasi kebijakan pada BSI Kumala Kel. sungai bambu:

- 1) Bapak Dindin Komarudin, A. KS berperan selaku Pembina sekaligus inisiator BSI Kumala. Sosoknya adalah pembina dari Yayasan Kumala Lingkungan serta ikut turut membantu dalam mengenalkan BSI Kumala ke Media. Tugas pokok dari pembina yaitu mengawasi jalannya Bank Sampah
- 2) Bapak Bayu Hermawan menjabat sebagai Ketua Pelaksana dengan kewenangan mengawasi kegiatan di Bank Sampah.
- 3) Bapak Ryan Robiandi, A.Md berperan sebagai wakil ketua yang mengandung tugas agar mewakili sekaligus mengontrol operasional di Bank Sampah.

- 4) Jajaran administrasi diisi oleh Bapak Syaipul Rachman sebagai sekretaris dan Ibu Sindi Mariyam sebagai bendahara. Selanjutnya, Yusriana Eka Putri bertugas sebagai teller, dan Bapak Fandi Junifar Danny, S.Kom, sebagai Humas BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut. Tugas fundamental dari tim ini adalah memberikan layanan transaksi bagi nasabah serta mengelola pencatatan barang yang masuk dan keluar.
- 5) Bapak Heru Mulyana berfungsi sebagai Koordinator Produksi Daur Ulang Sampah Anorganik, sementara Bapak Didi Sanudi menjadi Koordinator Produksi Daur Ulang Sampah Organik. Tim produksi ini diperkuat oleh Bapak Fajri, Yudi, dan Subur, yang terbagi ke dalam tiga unit kerja: pengambilan (Bangkeling) serta tim gudang yang menangani pemilahan, penimbangan, dan pengemasan.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwasanya distribusi tanggung jawab dan tugas pokok ke berbagai divisi yang berbeda telah diimplementasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari pendelegasian wewenang di berbagai divisi pada BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut dan Bank Sampah Unit yang telah disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, serta didukung oleh koordinasi yang solid dari seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut. Oleh karena itu, pembagian tugas dan kewenangan yang transparan ini memungkinkan program Bank Sampah dapat beroperasi dengan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar, Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BSI Kumala di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut telah berlangsung dengan cukup efektif.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur penulis pada kajian riset ini mengadopsi kerangka teori Edward III (dalam Subarsono, 2021) yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi/karakteristik, dan struktur birokrasi. Berdasarkan analisis, diperoleh simpulan dalam berikut ini:

1. Aspek komunikasi di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut telah berjalan dengan baik. Dari sisi transmisi, penyaluran informasi melalui media seperti grup Whatsapp sudah efektif, dan pesan mengenai pengumpulan serta pemilahan sampah tersampaikan secara jelas kepada warga. Akan tetapi, kendala muncul pada dimensi

transmisi akibat panjangnya alur birokrasi yang berpotensi menyebabkan distorsi implementasi. Sementara itu, dari segi konsistensi, materi informasi yang disebarakan cenderung seragam dan tidak berubah, meskipun jadwal pelaksanaannya belum ajek

2. Sumber daya memegang peranan vital dalam Implementasi Kebijakan; kerangka teoretis menjelaskan bahwa sejelas apa pun sebuah regulasi, jika dieksekusi oleh sumber daya pelaksana yang tidak kompeten atau tidak mencukupi, maka efektivitasnya akan menurun. Dalam praktiknya, seluruh personel bekerja sesuai deskripsi tugas yang ada, di mana pihak BSI Kumala sebagai eksekutor kebijakan mendapat dukungan sinergis dari yayasan mitra dalam hal pembagian tupoksi. Meskipun demikian, kuantitas sumber daya manusia masih terbilang kurang, terbukti dari minimnya jumlah pegawai yang direkrut sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Serupa halnya, sumber daya peralatan juga masih terbatas, dengan mesin pengangkut sampah menjadi satu-satunya perangkat penunjang utama yang ada.
3. Disposisi, atau karakteristik yang dikuasai implementor kebijakan, mencakup aspek-aspek penting seperti integritas, sikap demokratis, serta komitmen yang kuat. Sifat jujur akan memandu implementor agar bekerja sesuai koridor program yang tertulis dalam kerangka kerjanya. Lebih lanjut, terdapat sistem insentif bagi pegawai atau pelaksana program Bank Sampah di luar gaji pokok, yaitu berupa jaminan BPJS bagi staf inti yang aktif. Insentif tidak hanya diberikan kepada pegawai, tetapi juga kepada nasabah dan Bank Sampah Unit yang bermitra dengan BSI Kumala, dalam wujud pembagian sembako atau bingkisan yang diadakan setahun sekali.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut sudah selaras dengan mekanisme yang digunakan dalam implementasi, sehingga bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Kebijakan pengelolaan sampah pada program BSI Kumala yang berada di bawah naungan Yayasan Kumala telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai rujukan utama bagi mekanisme sistem dan pemanfaatan sumber daya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, teridentifikasi sejumlah faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan BSI Kumala di BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut. Faktor-faktor pendukungnya antara lain: 1) Regulasi yang Jelas dan Kuat, 2) Dukungan Finansial yang Memadai, 3) Partisipasi Masyarakat yang Aktif, 4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai, 5) SDM yang Kompeten, 6)

Kemitraan yang Efektif, 7) Teknologi yang Sesuai dan 8) Struktur Birokrasi yang Efisien. Sedangkan faktor penghambat meliputi : 1) Kurangnya Sarana dan Prasarana, 2) Terbatasnya SDM dan Anggaran, 3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat, 4) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, 5) Timbulan Sampah yang Tinggi, 6) Pengelolaan Sampah yang Tidak Terpadu, 7) Infrastruktur yang Tidak Mendukung dan 8) Pola Konsumsi yang Tidak Berkelanjutan

Berdasarkan temuan riset, bisa disimpulkan secara komprehensif bahwa tiga dari empat indikator, yakni komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi, telah berfungsi secara efektif. Sementara itu, satu indikator lainnya, yaitu sumber daya manusia, masih memerlukan peningkatan oleh pihak BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut.

Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti kepada para pelaksana kebijakan untuk pengembangan Bank Sampah di masa mendatang adalah diperlukannya adopsi teknologi pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan motivasi kepada nasabah melalui penawaran harga sampah yang lebih baik. Di samping itu, dukungan dan peran aktif dari pemerintah daerah sangat esensial. Peneliti perlu memberikan rekomendasi dalam berikut ini:

1. Pada aspek komunikasi. Sebaiknya perlu diupayakan peningkatan komunikasi yang efektif antar anggota, contohnya melalui grup Whatsapp yang aktif, agar terbangun kesamaan pandangan di antara nasabah, baik di lingkungan BSI Kumala maupun (BSU).
2. Pada aspek sumber daya. Terkait sumber daya manusia yang masih terbatas, sebaiknya dilakukan perekrutan pegawai yang terampil, berdedikasi, dan kompeten. Sementara itu, untuk sumber daya anggaran, disarankan adanya penyaluran hibah atau pinjaman modal, terutama untuk BSU maupun BSI Kumala, sebab tanpa pendanaan yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Pada aspek disposisi. Pihak BSI Kumala Kel. sungai bambu Kec. Tanjung Priok Jakut hendaknya senantiasa memelihara komitmen yang tinggi agar selalu bersemangat dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
4. Pada aspek struktur birokrasi. Dalam hal prosedur pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab, disarankan agar hubungan dengan berbagai pihak terus dijalin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiatma (2019). *Analysis of the tilization of Styrofoam Type Plastic Waste as Raw Material for Making Brick Bricks*.
- Ambar Tri Ratnaningsih (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sampah Anorganik Menjadi Produk Kerajinan yang Bernilai Ekonomis*.
- Agni (2022). *Utilization of Plastic Waste as a Brick Mixture Material in Efforts to Overcome Household Waste in Mpanau Village, Sigi Biromaru District, Sigi Regency*.
- Apriyani., (2020). *Pemanfaatan Sampah plastik menjadi Ecrobic*.
- Aniq, (2019). *Pemberdayaan Masarakat melalui Bank Sampah di Desa Lekep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*.
- Baharai, (2021) .Rancang Bangun Mesin Pengolah Sampah Menjadi Dan Pencacah
- Benhard,(2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo.Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25 kg/Jam.
- Bungin, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 65 ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dan pasal 1 ayat 24 Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah.
- Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3R Reduce, Reuce, dan Recycle berbasis masyarakat.

Peraturan-Peraturan :

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 16 huruf a Tentang Pemilahan Sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R Reduce, Reuce, dan Recycle berbasis masyarakat melalui Bank Sampah.